KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH MALUKU**	**NOMOR SOP**	:	W.28.OT.02.02-80
	TANGGAL PEMBUATAN	:	09 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	09 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah HENDRO TRI PRASETYO NIP. 196611241986031001
	NAMA SOP	:	TAHAPAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancanagan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancanagan Peraturan Perundang-Undangan.	1. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 2. Memahami mekanisme pembuatan laporan 3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN/KELENGKAPAN:**
SOP Pelaporan SOP Pelayanan Publik	1. Dokumen 2. Komputer/Laptop dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses dalam memberikan jawaban kepada pemohon akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA							BAKU MUTU			
		Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid Yankum	Kasubid FPPHD	Perancang	Petugas Admin	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian								1. Naskah Akademik 2. Izin pembentukan Ranperda	10 Menit	Surat dan Data Permohonan diterima	
2	Pemeriksaan administrasi terhadap permohonan								Surat Permohonan	1 Menit	Permohonan lengkap	
3	Analisa konsepsi terhadap substansi dan teknik perancangan peraturan daerah								Data Permohonan	3 Menit	Permohonan telah dianalisa konsep oleh Tim perancang	
4	Subbid FPPHD melaksanakan rapat pengharmonisasian antara perangkat daerah dengan instansi terkait								Konsep Permohonan	5 Menit	Kesepakatan hasil analisa konsepsi	
5	Kepala Kantor Wilayah menyampaikan naskah rancangan yang telah diharmonisasi								Hasil Analisa Konsepsi	5 Menit	Hasil analisa konsepsi telah diberi paraf persetujuan oleh Kepala daerah	
6	Kepala Kantor Wilayah membuat surat selesai harmonisasi								Konsepsi paraf persetujuan oleh Kakanwil		Surat selesai harmonisasi	
7	Pemohon menerima surat selesai harmonisasi								Surat Harmonisasi		Pemohon menerima surat selesai harmonisasi	

